

STRATEGI PERTAHANAN NEGARA EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KAPAL SELAM KLAS 209/1400 DSME DALAM STRATEGI PERTAHANAN NEGARA

NATIONAL DEFENSE STRATEGY EVALUATION OF PROGRAM THE BUILDING SUBMARINE CLASS 209/1400 DSME FOR NATIONAL DEFENSE STRATEGY

Edi Suhardono¹, Imam Baihaqi², Moh Ikhwan³

Program studi Strategi Perang Semesta, Universitas Pertahanan

(sunge_imam@yahoo.com)

Abstrak -- TNI AL membutuhkan 12 (dua belas) unit kapal selam sebagai unsur senjata strategis untuk menerapkan strategi pertahanan laut nusantara (SPLN) dalam menegakkan kedaulatan dan hukum di laut, sebagai amanah dari strategi pertahanan negara. Para pemangku kepentingan telah membuat program pembangunan unsur kapal selam untuk pemenuhan kebutuhan unsur senjata strategis dalam SPLN. Program telah berjalan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2017, pemenuhannya baru 2 (dua) unit tipe 209/1400 DSME, sedangkan program berakhir pada tahun 2018. Peneliti mengevaluasi program pembangunan kapal selam dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi apakah program dapat dilanjutkan, atau program dilanjutkan tetapi harus di revisi, atau program harus dihentikan. Temuan sementara yakni pemerintah selaku regulator selalu menuntut terpenuhinya skala keekonomian, TNI/TNI AL selaku pengguna selalu menuntut kualitas produk program, serta industri pertahanan selaku produsen selalu menuntut konsistensi pengguna untuk tetap menggunakan produk industri pertahanan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, latar belakang program telah sesuai program. Kedua, keberadaan sumber daya nasional belum siap untuk menyelenggarakan program. Ketiga, tantangan dan hambatan sangat mempengaruhi kegagalan dan kemunduran jadwal pelaksanaan proses program. Keempat, produk program belum sesuai dengan Opsreq dan jumlah kebutuhan pengguna.

Kata kunci: Evaluasi, Strategi, Kapal selam, Pertahanan maritim, Pemerintah

Abstract -- The Indonesian Navy need 12 submarines as strategic weapon to implement the national maritime defense strategy to maintain sovereignty and the law of the sea as the mandate of national defense strategy. The Stake Holders have made the decision to develop submarine to fulfill the need of strategic weapon elements. The program has already started from 2005 to 2017 but the procurement has only achieved 2 unit submarines type 209/1400 DSME, while the program will end in 2018. The researcher evaluates the program. The research has been done with qualitative descriptive method to examine the program whether it should be continued, need some change, or the program must be stopped. Recent discoveries shown that the government insisted that the program must meet the economic demands, Armed Forces/Navy to prosecute the quality of products, and defense industry to demand the consistency of the defense industry product to users. The conclusions of the research are: First, the

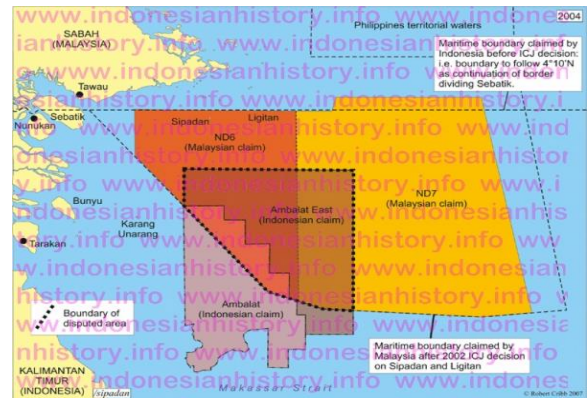
¹ Penulis adalah Mahasiswa Prodi SPS Fakultas Strategi Pertahanan Cohort 8

backgrounds of the program is suitable with needed analysis, policy base, and the goals of the program. Secondly, the national resources have not readiness to take care the program. Thirdly, threat and obstruction are possible cause to fail and hamper the proses of the program. Fourthly, the product of the program is not corresponding with the Operation Requirments and the number of user needs.

Keyword: Evaluation, strategy, Submarine, Maritime Defense, Government

Pendahuluan

Stabilitas dan keamanan nasional Indonesia menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menumbuh kembangkan semua aspek kehidupan. Sementara, kenyataannya stabilitas dan keamanan Indonesia saat ini dalam keadaan terancam oleh ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer dapat terlihat dari: Pertama, provokasi Malaysia di perairan Ambalat mulai tahun 2005 sampai sekarang. Mulai 21 Pebruari 2005 agresifitas Tentara Laut Diraja Malaysia TLDM telah menangkapi pekerja pembangunan Takat Unarang, Karang Unarang di Perairan Ambalat, Provokasi TLDM selanjutnya yaitu ketika mengusir nelayan Indonesia agar keluar dari perairan Ambalat dan sampai sekarang TLDM masih sering melakukan pelanggaran wilayah perbatasan.



Gambar 1. Peta Perairan Ambalat²

Gambar Peta Perairan Ambalat. Kedua, provokasi Australia dan Amerika Serikat di perairan Timor pada peristiwa lepasnya atau peristiwa disintegrasi Timor Timur pada tahun 1999, dan saat ini, kedua negara tersebut secara tidak langsung mendukung Separatis Papua. Ketiga, adalah adanya provokasi China di perairan Natuna yang terjadi pada bulan Mei 2016, bentuknya berupa provokasi Coast Guard China dan Vietnam terhadap TNI AL dan KKP di perairan Natuna, Coast Guard China tersebut dengan sengaja memprovokasi Indonesia dengan bermanuver di wilayah yurisdiksi Indonesia. Indonesia Protes China

²https://www.kompasiana.com/damos.agusman/ambalat-itu-apa-sih-pulau-atau-dasar-laut_558fe069f39273d415e25ef3#&gid=1&pid=1

Atas Pelanggaran Wilayah Laut³. Dari situasi diatas terindikasi, bahwa ancaman potensial telah mengancam stabilitas dan keamanan nasional.

1. Postur Pertahanan Negara Asing

Sebelum mengevaluasi program pembangunan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME, ada baiknya melihat postur negara-negara yang mempunyai banyak kepentingan di Indonesia. Sesuai buku putih Australia tentang postur Australia, Pemerintah Australia akan memastikan, bahwa negaranya akan membangun suatu postur *regionally*, *Australian Defence Force* ADF yang unggul dengan level paling tinggi dari kemampuan militer dengan teknologi yang terkini. Kekuatan masa depan akan dibangun lebih mampu, lebih tangkas dan lebih kuat. kekuatan masa depan akan dibangun lebih mampu dari daya serang yang bergerak secara mandiri dalam operasi untuk mempertahankan Australia dan untuk melindungi kepentingan negaranya. Kekuatan ini juga akan menambah kemampuan Australia untuk menyokong ke operasi untuk mendukung aliansi sekutunya secara global. Penekanan

lebih akan diutamakan untuk gugus tugas gabungan, menggabungkan kemampuan ADF dapat membentuk kekuatan yang lebih besar dengan cepat dan lebih efektif ketika perlukan. Memodernisasi kemampuan maritim akan ke satu fokus kunci. Kekuatan kapal selam akan ditingkatkan dari 6 ke 12 kapal selam yang mempunyai keunggulan regional dengan satu derajat lebih tinggi yang dapat ter-interoperability dengan Amerika Serikat. Kemampuan kapal permukaan termasuk tiga Kelas *Hobart* jenis Kapal Perusak untuk peperangan udara dan satu kelas baru berupa sembilan fregat masa depan yang didukung oleh kapal bantu pengisian logistik. Kemampuan pertahanan untuk menyokong perlindungan perbatasan yang akan ditambahkan dengan unit kapal patroli lebih lepas pantai, yang dilengkapi dengan pesawat terbang diawaki dan tak berawak dan satu lagi kapal besar jenis patroli multi fungsi, sebagai sistem pertahanan Australia berupa Kapal *Pelindung Samudra*. ADF akan diperlengkapi dengan satu kekuatan udara petarung dan kemampuan serangan udara yang terpusat di F - 35A Kilat II. dan E/A - 18G Penggeram yang membangun di atasnya arus armada dari F/A - 18 Super

³ <https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-protas-china-atas-pelanggaran-wilayah-laut/3247023.html>

Hornet, Kapasitas ADF untuk operasi amfibi akan diperkuat oleh perlengkapan dari senjata baru dan alat-alat perlengkapan untuk kapal amfibi. Helikopter ringan baru akan diperoleh untuk mendukung operasi pasukan Khusus.

Sesuai buku putih pertahanan Tiongkok (2015) dengan judul Strategi Militer Tiongkok. Sebagai buku putih perdana yang secara khusus mengurai strategi militer Tiongkok, buku ini mencerminkan perkembangan terbaru pikiran strategi defensif positif, menyampaikan pesan bahwa Tiongkok mencintai perdamaian, mendukung pendirian tindakan kepercayaan, serta menaruh perhatian masyarakat internasional. Walaupun putih pertahanan kali ini tidak ada angka-angka, tapi fokus pada pedoman strategis militer defensif tetap positif, dengan sepenuhnya memperlihatkan figur dan sikap tentara Tiongkok yang terbuka, transparan, dan percaya diri. Dijelaskan, bahwa Tiongkok membicarakan kekhawatiran keamanan negaranya, misalnya provokasi dari negara tetangga mengenai kedaulatan wilayah Tiongkok dan masalah kepentingan lautan Tiongkok, serta sejumlah negara di luar

kawasan yang ikut campur dalam urusan Laut Tiongkok Selatan. Di sini dipaparkan perang apa saja yang akan dilakukan oleh tentara Tiongkok, mencantumkan misi baru dan 8 tugas strategis tentara Tiongkok masa kini, namun strategi militer Tiongkok bertujuan lebih baik untuk mencegah perang dan memelihara perdamaian. Kebijakan diplomatik damai dan kebijakan pertahanan defensif Tiongkok tidak akan berubah.

Kebijakan pertahanan Amerika Serikat secara umum masih menunggu kebijakan-kebijakan yang akan digulirkan oleh pemerintah Donald Trump. Sedangkan postur pertahanan Amerika Serikat, data (2010) Amerika Serikat memiliki pesawat tempur sebanyak 4334 buah. Dalam hal jumlah helikopternya, ternyata Amerika memiliki 5741 buah. Jelas, Inggris tidak ada apa-apanya dibanding Amerika. Angkatan lautnya pun kedigdayaan Amerika memang cukup membuat decak kagum dunia. 71 Kapal Selam, 11 kapal induk, 52 destroyer, 22 kapal fregat, 41.422 rudal, dan 7620 tank. Berapa jumlah total pasukan militernya? Belum ada data yang cukup valid mengenai ini. Tapi mari sekadar buat perbandingan. Total jumlah pasukan

Tentara Nasional Indonesia saat ini berjumlah 316.000. Sedangkan pasukan Amerika yang digelar di Irak berjumlah 119.000, sedangkan yang disebar di Afghanistan berjumlah 67 ribu orang. Jadi, khusus pasukan Amerika yang dikirim ke Afghanistan dan Irak, berjumlah hampir sekitar 50 persen jumlah total pasukan TNI kita. Bisa dibayangkan berapa kali lipat jumlah pasukan Amerika di ketiga matra angkatan bersenjata.

Postur pertahanan Malaysia jumlah penduduk 28.726.607 orang, militer aktif 124.000 personel, cadangan 640.199 personel. Kekuatan udara (*Air Power*) pesawat 258 unit, helicopter 103 unit. Kekuatan darat (*Land Army*) terdiri dari tank 74 unit, APC 977 unit, tower artillery 54 pucuk, MLRSS 36 unit, Mortar 200 unit, Senjata anti tank 1.124 unit, anti penangkis udara 733 unit. Kekuatan Laut (*Naval Power*) terdiri dari kapal perang 65 unit, kapal selam 2 unit, patroli udara 37 unit, kapal untuk serangan amfibi 1 unit.

Buku putih pertahanan Indonesia sebagai acuan terbuka bagi masyarakat internasional adalah memuat data perkembangan dunia strategi baik global, regional, maupun nasional. Dari

perkembangan dunia strategi memformulasikan beberapa potensi ancaman yang terdiri dari ancaman nyata dan belum nyata. Bentuk ancaman nyata di antaranya terorisme, bencana alam, narkoba, cyber crime, serta penyelundupan. Sedangkan ancaman belum nyata ialah perang konvensional. Buku putih juga membahas tentang kebijakan umum pertahanan Indonesia, kebijakan umum kerja sama internasional. Kebijakan umum kemandirian nasional.

2. Keamanan Nasional

Menurut Snow (2016, p.13) keamanan nasional terbagi dalam dimensi global dan dimensi nasional. Dalam dimensi global mempunyai pengertian, bahwa keamanan nasional Indonesia berhubungan dengan kepentingan asing. Kepentingan asing yang berbenturan dengan kepentingan nasional akan menimbulkan konflik, agar supaya tidak terjadi konflik maka diperlukan manajemen konflik "*Managing Dispute*". Permasalahannya, seringkali negara asing khususnya negara kuat dalam mengamankan kepentingannya disertai dengan pemaksaan baik dengan cara halus maupun dengan cara yang kasar, inilah yang disebut sebagai potensi ancaman

terhadap keamanan nasional Indonesia. Dalam dimensi nasional konsep Snow menyebutkan, bahwa tingkatan kondisi keamanan nasional suatu negara adalah paralel dengan penguasaan kedaulatan *Sovereignty* negara tersebut, oleh sebab itu dalam mempertahankan keamanan nasional, Indonesia paling tidak harus membuat pendekatan keseimbangan *"Ballanced Approach"* untuk mengimbangi kekuatan negara asing yang berpotensi menjadi ancaman bagi Indonesia. Menurut Thomas dan Mathews (2008, p.23) tujuan perimbangan kekuatan fokus kepada keamanan dan keselamatan manusia sebagai warga negara secara keseluruhan *human security*. Perimbangan kekuatan nasional diaktualisasikan dalam bentuk kemampuan menggunakan kekerasan *coercive capacity*, penyediaan kekuatan infrastruktur *infrastructural power*, dan legitimasi tanpa-syarat *unconditional legitimacy*. Umumnya perimbangan kekuatan pertahanan untuk keamanan nasional dilakukan dengan peningkatan kekuatan militer dan menyediakan teknologi informasi sebagai infrastruktur dalam sistem pertahanan negara. *National security is a concept that a government,*

*along with its parliaments, should protect the state and its citizens against all kind of "national" crises through a variety of power projections, such as political power, diplomacy, economic power, military might, and so on. The concept developed mostly in the United States after World War II.*⁴

3. Strategi Pertahanan Negara

Berdasarkan kondisi dan situasi di atas negara memerlukan tameng untuk menghadapinya yaitu strategi pertahanan negara. Rencana strategi lima tahunan untuk menentukan strategi pertahanan negara, paling tidak memuat tiga komponen yang berbeda yaitu bentuk *Shape*, menjawab atau respon *Respond*, dan mempersiapkan *Prepare* (Hillestad, 1998). Bentuk strategi pertahanan adalah untuk mengangkat hal-hal penting dari pembentukan perubahan lingkungan strategis dan menyiapkan dalam jangkauan yang panjang untuk mengantisipasi tantangan kedepan dengan mentransformasikan dalam bentuk postur kekuatan bersenjata. Rencana strategis juga diambil dari kemampuan analisa *Capabilities Analysis* untuk menjawab

⁴<https://www.jstor.org/topic/national-security?refreqid=%20excelsior%3A95d7a2b8521%20c8d6d776f9b735c266d71>

dalam bentuk komponen postur pertahanan dengan penekanan pemenuhan kebutuhan agar mempunyai kemampuan operasional dengan seting keragaman pada level tinggi dari situasi kontinjensi militer dan kontinjensi bermacam-macam keadaan, termasuk keadaan ketika menghadapi peringatan penyerangan dari ancaman atau ketika menghadapi penyerangan yang menggunakan senjata pemusnah massal atau ketika menghadapi peperangan asimetris.

Selaras dengan (Hillestad, 1998) mendapati perubahan secara bersamaan ditandai dengan keberangkatan kebiasaan yang berjalan yang diambil dari strategi sebelumnya, Kementerian Pertahanan telah memperlihatkan mempunyai niat memutuskan untuk merencanakan kekuatan dasar pada konstruksi intelektual yang lebih luas dari rencana kontinjensi yang ada. Program pertahanan disesuaikan dengan pembangunan dan pengembangan pertahanan namun disesuaikan dengan kemampuan penganggaran yang disediakan negara. Diharapkan, skemanya dapat terbangun secara sinergi. Masih menurut Hillestad, Komponen

perencanaan strategi pertahanan negara dapat mempedomani dengan mengaplikasikan *Revolution Military Affair (RMA)*. *The core responsibility of the Department of Defense is to defend the United States from attack upon its territory at home and to secure its interests abroad. The U.S. Armed Forces protect the physical integrity of the country through an active layered defense. They also deter attacks upon it, directly and indirectly, through deployments at sea, in the air, on land, and in space.*⁵

Sesuai UU nomor 3 tahun 2002 pasal 1, bahwa Indonesia menerapkan Strategi perang semesta sebagai strategi pertahanan negara. Sistem pertahanan ini bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Penerapan strategi perang semesta sangat sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia. Pertama, Indonesia sebagai

⁵<https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2008NationalDefenseStrategy.pdf>

negara yang berpolitik luar negeri bebas aktif dimana ketergantungan dukungan kekuatan militer asing yang lazim dalam aliansi pertahanan dapat ditanggulangi dengan memberdayakan seluruh komponen bangsa dalam menghadapi setiap ancaman keamanan nasional. Kedua, sumber daya nasional sangat memungkinkan untuk dikelola dalam mendukung sistem pertahanan negara.

4. Strategi Pertahanan Laut Nusantara SPLN

Strategi pertahanan negara di laut atau Strategi Pertahanan Laut Nusantara (SPLN) adalah strategi pertahanan yang disusun berdasarkan konsep geostrategi sebagai negara kepulauan, sesuai dengan Undang-undang RI nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, bahwa pertahanan negara disusun dengan mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. *Regarding excessive maritime claims, several claimants within the region have asserted maritime claims along their coastlines and around land features that are inconsistent with international law*⁶. SPLN dirancang

berdasarkan pada tiga pilar yang saling terkait mulai dari penangkalan, pertahanan berlapis, dan pengendalian laut. Konsep pertahanan berlapis yaitu konsep pertahanan yang bertumpu pada keterpaduan antara lapis pertahanan militer dan lapis pertahanan nirmiliter. Konsep pertahanan negara yang bersifat pertahanan berlapis memiliki tujuan untuk penangkalan, mengatasi dan menanggulangi ancaman militer atau nonmiliter dan untuk tujuan menghadapi perang berlarut.

5. Sea Control

Menurut Vego (2016, p.54), bahwa *“obtaining or securing sea control is the first and most critical step in the struggle for sea control. This phase ends with accomplishing a given operational or strategic objective”*. Mendapatkan atau mengamankan pengendalian laut adalah langkah pertama dan paling penting dalam perjuangan pengendalian laut. Fase ini diakhiri dengan pencapaian tujuan strategis operasional. Tujuan Strategi pertahanan negara di laut adalah untuk mengendalikan laut, mengontrol laut, penguasaan laut, serta kedaulatan di laut. Strategi dilaksanakan pada masa damai, dan

⁶https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/public/NDAA%20A-P_Maritime_Security_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF

merupakan integrasi usaha pertahanan yang mencakup aspek politik, ekonomi, psikologi, dan teknologi, serta aspek militer. Konsep strategi pertahanan negara di laut meliputi: bentuk, respon, prepare. Bentuk (*Shape*) strategi pertahanan negara di laut ditransformasikan dalam bentuk sistem pertahanan yang didukung postur unsur kapal selam. Respon (*Respond*) postur kapal selam untuk menjawab dalam menghadapi musuh yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa. Mempersiapkan (*Prepare*) unsur kapal selam Armada RI dengan menentukan program jangka pendek, program menengah dan program jangka panjang.

6. Program Pembangunan Kapal Selam Nasional

Program Pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dilandasi oleh Opsreq dan jumlah kebutuhan pengguna. Kebijakan di atas selaras dan mendapat dukungan dari Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, selain itu juga mendapat dukungan dari Peraturan Presiden no 76 tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam

pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, serta Permenhan nomor 35 tahun 2015 tentang perencanaan kebutuhan Alutsista. Program pembangunan kekuatan kapal selam dimulai dari adanya kebutuhan oleh pelaksana strategi pertahanan negara di laut, selanjutnya kebutuhan ditransformasikan dalam bentuk jumlah dan jenis kapal selam. Skema program pembangunan kekuatan kapal selam diupayakan dibangun di dalam negeri oleh industri pertahanan, karya putra dan putri Indonesia dengan tujuan agar mempunyai kemandirian dalam mengoperasikan, kemandirian dalam memelihara, dan kemandirian dalam memproduksi.

7. Kemandirian Nasional

Kemandirian dalam mengoperasikan mempunyai keuntungan yaitu tidak terhalang oleh proteksi dari negara manapun, serta dapat menjaga kerahasiaan dalam operasi unsur kapal selam dimanapun dan kapanpun. Kemandirian dalam memelihara mempunyai beberapa keuntungan yaitu dapat mengembalikan kondisi teknis kapal selam sesuai fungsi asasinya, menghemat devisa, serta memberdayakan Industri Pertahanan.

Kemandirian memproduksi mempunyai keuntungan yaitu selain menghemat dan mendatangkan devisa juga mempunyai keuntungan yang sangat besar yaitu Indonesia dapat mengembangkan desain kapal selam sesuai kebutuhan operasi (Opsreq) dalam strategi pertahanan negara di laut. Keputusan pembelian atau pengadaan dari luar negeri dapat dilakukan apabila industri pertahanan tidak mampu memproduksi atau membangun kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam strategi pertahanan laut nusantara.

8. Regulasi

Berdasarkan kebutuhan di atas, para pemangku kepentingan yaitu pemerintah yang diwakili Kementerian pertahanan, dan Pengguna dalam hal ini TNI/TNI AL, serta Industri pertahanan dengan *Lead Integrator* PT PAL telah membuat Program pembangunan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME yang beriringan dengan kontrak pengadaan kapal selam dari Korea Selatan. Program pembangunan unsur kapal selam ini tidak lepas dari Undang-undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan sebagai produsen dan penyedia unsur kapal selam, Peraturan

Pemerintah nomor 76 tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang dalam pengadaan alat peralatan pertahanan dan keamanan dari luar negeri, dan Permenhan nomor 35 tahun 2015 tentang perencanaan kebutuhan Alutsista.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam mengevaluasi program pembangunan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME. Dasar kuat menggunakan metode kualitatif adalah keberadaan peneliti sebagai instrumen kuat penelitian. Pertimbangan keberadaan sumber data primer dan sekunder sangat memungkinkan peneliti untuk menerapkan metode penelitian kualitatif.

Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini untuk menguraikan seluruh rangkaian penelitian mulai dari menganalisa dan mengevaluasi latar belakang program, diikuti dengan menganalisa dan mengevaluasi kesiapan sumber daya nasional program, dan menganalisa dan mengevaluasi tantangan dan hambatan yang dapat menggagalkan dan menghambat program,

serta menganalisa dan mengevaluasi produk program. Pembahasan penelitian untuk menganalisa dan mengevaluasi program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME. Tujuan analisa dan evaluasi program untuk menyimpulkan program layak dilanjutkan, atau program cukup diperbaiki, atau program harus dihentikan.

1. Model-model Evaluasi

Model evaluasi adalah desain-desain evaluasi yang telah dibuat oleh para ahli evaluasi untuk mengevaluasi program kebijakan yang telah berjalan, tentunya model evaluasi disesuaikan dengan tujuan dan kepentingan kegiatan evaluasi. Nama-nama model evaluasi biasanya mengambil nama dari pembuatnya. Model-model evaluasi oleh para ahli dikelompokkan kedalam tujuh model yaitu: Pertama, model kesenjangan (*discrepancy*) dikembangkan oleh Malcom Provus. Kedua, model evaluasi bebas tujuan (*goal free evaluation*) dikembangkan oleh Scriven. Ketiga, model evaluasi formatif dan sumatif (*formative-sumative evaluation*) dikembangkan oleh Scriven. Keempat, model berorientasi pada tujuan (*goal oriented*) dikembangkan oleh Tyler. Kelima, model CIPP (*context, input, proses, product*) dikembangkan oleh

Stufflebeam. Keenam, model persetujuan (*countenance*) dikembangkan oleh Stake. Ketujuh, model *center for study of evaluation (CSE) University of California Los Angeles (UCLA)* dikembangkan oleh Marvin Alkin.

2. Pemilihan CIPP

Pemilihan CIPP sebagai pisau penelitian untuk mengevaluasi suatu program kebijakan publik dilandasi oleh beberapa hal antara lain: Pertama, model *Context, Input, Process, Product (CIPP)* sudah cukup sebagai model evaluasi untuk mengevaluasi suatu program kebijakan negara, karena CIPP dapat mengidentifikasi mulai dari latar belakang (*Context*), dapat mengidentifikasi kesiapan sumber daya nasional (*Input*), dapat mengidentifikasi Tantangan dan hambatan (*Process*), dan mengidentifikasi hasil akhir program (*Product*). Kedua, CIPP dapat mengevaluasi program mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi, sampai pada tahap tindak lanjut.

3. Evaluasi Program Pembangunan Kapal Selam dengan CIPP

Evaluasi program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME dimulai dari: Pertama, identifikasi latar belakang

(Context). Kedua, identifikasi kesiapan sumber daya nasional (*Input*).Ketiga, identifikasi tantangan dan hambatan (*Process*).Keempat, hasil akhir program (*Product*)

4. Proses Evaluasi

Proses evaluasi adalah memonitor, mencermati untuk menilai capaian program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME. Penilaian capaian program meliputi Evaluasi latar belakang (*Context*), Evaluasi kesiapan sumber daya nasional (*Input*), evaluasi tantangan dan hambatan (*Process*), serta evaluasi hasil akhir program (*Product*).

- a. Evaluasi latar belakang (*Context*). Evaluasi latar belakang dilaksanakan identifikasi analisa kebutuhan diselenggarakannya program, identifikasi dasar kebijakan program, serta identifikasi tujuan program pembangunan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME.
- b. Evaluasi kesiapan sumber daya nasional (*Input*). Evaluasi kesiapan Sumdanas dilaksanakan dengan mengidentifikasi strategi, identifikasi struktur, identifikasi program, identifikasi prosedur,

identifikasi SDM, identifikasi anggaran, serta mengidentifikasi infrastruktur.

- c. Evaluasi tantangan dan hambatan (*Process*) dilaksanakan dengan mengidentifikasi tantangan yang dapat menggagalkan program, serta mengidentifikasi hambatan yang dapat merintang program. Tantangan yang dapat menggagalkan program dengan mengidentifikasi ancaman dari luar yang berpotensi dapat menggagalkan program. Sedangkan hambatan yang dapat merintang penyelenggaraan program berasal dari dalam negeri.
- d. Evaluasi hasil akhir program (*Product*)dengan mengidentifikasi kualitas produk program, serta mengidentifikasi kuantitas produk program. Kualitas program ditentukan dengan parameter berupa Opsreq pengguna, namun secara teknis Assessment dapat dilakukan dengan menggunakan protokol *Technology Readiness Level* (TRL). Sedangkan untuk mengidentifikasi kuantitas produk dilaksanakan dengan menggunakan patokan jumlah pengguna.

5. Ringkasan Evaluasi

Ringkasan evaluasi merupakan hasil dari pelaksanaan evaluasi program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME. Ringkasan evaluasi meliputi ringkasan evaluasi *Context* program, *Input* program, dan *Process* program, serta ringkasan evaluasi *Product* program. Secara berurutan ringkasan evaluasi program dijelaskan sebagai berikut:

a. Ringkasan evaluasi *Context*

Bahwa skema pemenuhan kebutuhan kapal selam telah sesuai dengan analisa kebutuhan dalam strategi pertahanan laut nusantara sebagai amanah strategi pertahanan negara.

Latar belakang program pembangunan unsur kapal selam telah sesuai dengan dasar kebijakan nasional yakni kemandirian nasional dalam menjaga ketersediaan “*Sustainability*” unsur kapal selam dalam strategi pertahanan negara.

Latar belakang program pembangunan unsur kapal selam telah sesuai dengan tujuan penerapan strategi pertahanan negara yakni memberikan dampak penangkalan (*Deterrence Effect*).

b. Ringkasan evaluasi *Input*

strategi penyiapan sumber daya belum sesuai dan belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan kapal selam.

Struktur organisasi dan kelembagaan dalam menyiapkan sumber daya nasional belum sesuai dan belum optimal dalam menyelenggarakan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam.

Program penyiapan sumber daya nasional belum sesuai dan belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME.

Prosedur dan mekanisme dalam penyiapan sumber daya nasional belum sesuai atau belum dirumuskan dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan kapal selam.

Penyiapan dan ketersediaan anggaran belum efektif dan belum efisien dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam.

Penyiapan sumber daya manusia belum maksimal dan belum optimal dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan kekuatan unsur kapal selam.

Penyiapan infrastruktur untuk kesiapan manufaktur belum maksimal dan belum sesuai dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam.

c. Ringkasan evaluasi *Process*

Tantangan dapat menggagalkan program pembangunan kapal selam 209/1400 DSME secara mandiri. Tantangan umumnya berasal dari negara-negara asing yang mempunyai kepentingan terhadap ketidak mampuan Indonesia. Tantangan umumnya berasal dari negara-negara yang mempunyai kepentingan terhadap ketidak majuan Indonesia.

Hambatan terhadap program dapat menghalangi serta memperlambat program pembangunan kapal selam 209/1400 DSME secara mandiri. Hambatan-hambatan program berasal dari dalam negeri sendiri. Saat ini strategi dan upaya pemerintah untuk menghadapi hambatan masih banyak mengalami kendala terutama hambatan yang timbul akibat dari sikap dan perilaku para pemangku kepentingan.

Sikap dan perilaku para pemangku kepentingan yang menghambat program adalah sikap dan perilaku yang kontra produktif terhadap sinergitas para pemangku kepentingan dalam program pemangyan kapal selam Klas 209/1400 DSME.

d. Ringkasan evaluasi *Product*

Ringkasan evaluasi produk program yakni mengambil inti pokok prgram yang terkait dengan tingkat kualitas dan kuantitas produk program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME. Penilaian atau *Assessment* analisa produk menggunakan protokol penilaian tingkat kesiapan teknologi atau *Technology Readiness Level* untuk mengetahui tingkatan kualitas produk yang dimaksud. Kuantitas produk dapat dilihat dari jumlah produk yang dihasilkan dalam kurun waktu yang ditentukan, sedang batas waktu pemenuhan kebutuhan yang ditentukan adalah 12 (dua belas) unit dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024. Secara umum produk kapal selam dari program pembangunan yang dimulai dari tahun 2013 sampai 2018 adalah kapal

selam Diesel Elektrik tipe 209/1400 DSME, hanya mampu menembakkan terpedo, sedangkan Opsreq TNI AL mengharapkan mampu menembakkan peluru kendali dengan sasaran *Sub To Surface* maupun *Sub to Land Target*.

Kualitas produk program belum sesuai dengan Opsreq TNI AL sebagai pengguna dan pelaksana strategi pertahanan negara. Opsreq produk program saat ini adalah kapal selam yang hanya mampu menembakkan terpedo. Sedangkan, Opsreq kapal selam yang dibutuhkan oleh TNI AL untuk mengemban tugas strategi pertahanan laut nusantara adalah kapal selam yang mempunyai kemampuan menembakkan terpedo serta mempunyai kemampuan menembakkan peluru kendali baik untuk sasaran permukaan *Sub to Surface* maupun untuk sasaran darat strategis *Sub to Land Strategic*. Beberapa negara yang mempunyai kemampuan memproduksi kapal selam, dari awalnya tidak serta merta bisa membangun kapal selam yang sesuai dengan kebutuhan dalam Opsreq mereka. Negara tersebut dalam penguasaan teknologi kapal selam

melalui tahapan-tahapan, Korea Selatan sendiri untuk memenuhi kebutuhan kapal selam berdasarkan Opsreq angkatan lautnya ditempuh dalam kurun waktu 20 (dua puluh tahun).

Jumlah produk program saat ini, per-agustus 2017 baru 1 (satu) unit kapal selam yang diterima TNI AL sebagai pengguna, akhir tahun 2017 TNI AL akan menerima lagi 1(satu) unit kapal selam. Tahun 2017 merupakan tahun ke-12 dari 19 tahun penyelenggaraan program pembangunan kekuatan kapal selam. Dengan kata lain, masih ada 7 (tujuh) tahun tersisa untuk memenuhi kebutuhan 10 (sepuluh) unit kapal selam. Bila bereferensi harga, dengan harga kurang lebih 335,000,000 USD tiap unit kapal selam tipe 209/1400 DSME, maka diperlukan anggaran sebesar 3,350,000,000 USD.

Catatan:

1. Perbandingan antara = sesuai : kurang lebih sesuai : tidak sesuai = 5 : 11 : 2
2. Kesimpulan, bahwa perencanaan dan penyelenggaraan program lebih kurang sesuai dengan program pembangunan kapal selam klas 209/1400

Tabel Matrik Skoring Program Pembangunan Kapal Selam Klas 209/1400 DSME
Dalam Strategi Pertahanan Negara

NO	CIPP	ASPEK YANG DI EVALUASI	PERTANYAAN	SESUAI	KURANG LEBIH SESUAI	TIDAK SESUAI
1	Contex	Analisa kebutuhan	1. Program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME dihadapkan dengan kebutuhan unsur kapal selam dalam strategi pertahanan	X		
		Dasar kebijakan	2. Apakah Program pembangunan kapal selam Klas 209/1400 DSME dihadapkan dengan kebijakan nasional yakni kemandirian nasional dalam pemenuhan kebutuhan kapal selam.	X		
		Tujuan	3. dihadapkan kepada dampak penangkalan	X		
			4. mempunyai skala keekonomian.	X		
2	Input	Strategi	5. Apakah strategi penyiapan sumber daya sudah sesuai dengan master plan maupun road map program		X	
		Struktur	6. Apakah kelembagaan dan organisasi pelaksanaan program sudah sesuai dg program		X	
		Program	7. Apakah program yang ada sudah sesuai dengan penyiapan sumdanas.		X	
		Prosedur	8. Apakah prosedur yang ada sudah sesuai dengan mekanisme program		X	
		SDM	9. Apakah penyiapan SDM yang ada sudah sesuai dengan kebut personel dalam program		X	
		Anggaran	10. Apakah anggaran yang disediakan sudah sesuai dengan kebutuhan anggaran program		X	
		Infrastruktur	11. Apakah Main Workshorp yang ada sudah sesuai kebutuhan dalam program	X		
			12. Apakah peralatan khusus yang ada sudah sesuai kebutuhan dalam program		X	
			13. Apakah perangkat penggetesan yang ada sudah sesuai kebutuhan dalam program			X
			14. Apakah fasilitas pengembangan desain yang ada sudah sesuai kebutuhan dalam program		X	
3	Process	Tantangan thd Pelaksanaan program	15. Apakah strategi yang ada dapat menghadapi tantangan yang dapat menggagalkan program		X	
		Hambatan thd Pelaksanaan program	16. Apakah strategi yang ada dapat menghadapi hambatan yang dapat menghambat program		X	
4	Product	Kualitas produk kapal selam	17. Apakah kualitas produk program sudah sesuai dengan kebutuhan Opsreq dan Spektek pengguna.		X	
		Kuantitas produk kapal selam	18. Apakah kuantitas produk program sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan pengguna. Tujuan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam yakni terealisasinya pemenuhan kebutuhan unsur kapal selam sebanyak 12 (dua belas) unit dalam kurun waktu tahun 2005 sampai dengan 2024.			X
Total				5	11	2

DSME dalam strategi pertahanan negara. Oleh karena itu, program masih dapat dilanjutkan dengan sangat memperhatikan aspek kesiapan manufaktur industri pertahanan.

Kesimpulan

1. Evaluasi *Context* untuk mengidentifikasi latar belakang program yang terdiri dari analisa kebutuhan, dasar kebijakan , serta tujuan program. Secara umum konteks program sudah sesuai dengan kebutuhan, dasar kebijakan, kecuali tujuan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME dalam strategi pertahanan negara belum sesuai dengan Opsreq pengguna.
2. Evaluasi *Input* untuk mengidentifikasi kesiapan dan kemampuan sumber daya nasional yang terdiri dari strategi, struktur, program, prosedur, SDM, dan anggaran, serta infrastruktur. Secara umum kesiapan dan kemampuan sumber daya nasional belum sesuai dan belum dapat mendukung program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dalam strategi pertahanan negara secara mandiri.
3. Evaluasi *Process* untuk mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam

penyelenggaraan program. Secara umum strategi yang telah berjalan saat ini belum dapat untuk menghadapi tantangan sebagai potensi untuk menggagalkan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dalam strategi pertahanan negara secara mandiri.

4. **Evaluasi *Product*** untuk mengidentifikasi kualitas dan kuantitas produk. Secara umum produk program belum sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ingin dicapai. Kapal selam Produk program hanya merupakan unsur senjata taktis, sedangkan Opsreq pengguna adalah kapal selam sebagai unsur senjata strategis. Kuantitas produk baru 9 % atau baru 1 (satu) unit kapal selam yang diterima pengguna, padahal pada tahun 2017 ini seharusnya pengguna sudah menerima minimal 6 (enam) unit kapal selam.

Saran

1. Saran Teoritis

- a. Negara supaya membuat kajian dengan teori yang tepat tentang kelebihan-kelebihan dari membangun kapal selam secara mandiri dan

dampaknya terhadap strategi pertahanan negara.

- b. Para pemangku kepentingan berkewajiban membuat kajian untuk merumuskan *Master Plann* dan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dalam strategi pertahanan negara secara mandiri,
- c. Para pemangku kepentingan berkewajiban membuat kajian untuk merumuskan *Road Map* program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dalam strategi pertahanan negara secara mandiri.
- d. *Master Plan* dan *Road Map* program pembangunan unsur kapal selam supaya dilandasi dengan peraturan atau perundangan-undangan sehingga dapat menjadi pedoman dalam implementasinya.

2. Saran Praktis

- a. Program pembangunan unsur kapal selam Klas 209/1400 DSME dalam strategi pertahanan negara layak untuk diteruskan dengan catatan outcome program harus mempunyai dampak penangkalan atau *Deterrence*

Effect serta memenuhi skala keekonomian atau *Multiplier Effect*.

- b. Penyiapan kemampuan sumber daya nasional dalam penyelenggaraan program pembangunan kekuatan unsur kapal selam Armada RI dalam strategi pertahanan negara secara mandiri harus dilaksanakan dengan tepat waktu karena akan menentukan tingkat kesiapan manufaktur atau *Manufacture Readiness Level* juga menentukan tingkat kesiapan teknologi atau *Technology Readuness Level*.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Anwar, Syaiful (2016). *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Bakrie, Connie Rahakundini, (2007), *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, Jakarta: Yayasan Obor Jakarta.
- Bandoro, Bantarto (2014) *State's Choice of Strategies*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Beaufre, Andre (1986). *An Introduction to Strategy*. Washington: Frederick A. Praeger.
- Booth, Ken. (2014). *Law, Force and Diplomacy at Sea*. New York: Routledge .
- Creswell, John W. (2013) *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: Sage
- Djelantik, Sukawarsini (2015). *Asia pasifik konflik, Kerja Sama, dan Relasi Antar*

Kawan. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Hermawan, P.Yulius (2007) *Transformasi dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Graha Ilmu

Indrawan, Rully & Yaniawati, R. Poppy (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran*. Bandung: Refika Aditam

Jeong, Ho-Won (2010). *Conflict Management and Resolution*, New York: Routledge.

Karim, Silmy. (2014) *Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

Patilima, Hamid. (2011) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA

Prabowo, JS (2009). *Pokok-pokok Pemikiran tentang Perang Senesta*. Jakarta: PT Gramedia Printing.

Snow, Donald M. (2016). *National Security for a New Era*. New York: Routledge.

YIN, Robert K. (2015). *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Rajawali Pers

Vego, Milan (2016) *Maritime Strategy and Sea Control*. New York: Routledge

Internet

https://www.kompasiana.com/damos.agusman/ambalat-itu-apa-sih-pulau-atau-dasar-laut_558fe069f39273d415e25ef3#&gid=1&pid=1

<https://www.voaindonesia.com/a/indonesia-protes-china-atas-pelanggaran-wilayah-laut/3247023.html>

<https://www.jstor.org/topic/national-security/?refreqid=%20excelsior%3A95d7a2b8521%20c8d6d776f9b735c266d7>

<https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2008NationalDefenseStrategy.pdf>

<https://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/NDAA%20A->

P_Maritime_Security_Strategy-08142015-1300-FINALFORMAT.PDF

Peraturan

Peraturan Kasal Nomor 5 tahun 2016 tentang Kebijakan Dasar Pembangunan TNI AL Menuju Kekuatan Pokok Minimum.

Peraturan Kasal nomor 6 tahun 2016 tentang Postur TNI AL tahun 2005 sampai dengan 2024

Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2014 tentang mekanisme imbal dagang setiap pembelian dari luar negeri.

Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Jakarta: Kemhan.

Permenhan Nomor 35 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Kebutuhan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

